

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Darmabrata, W., dan Surini Ahlan Sjarif, 2024, Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia, Cetakan Kedua, (Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Indonesia).
- J.M Henny Wiludjeng, 2020, Hukum Acara Perkawinan Dalam Agama - Agama, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Kartikawati, D, R., 2021, Hukum Waris Perdata, Cet. Pertama, Tasikmalaya: Cv Elvaretta Buana.
- Margono, 2021. Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset,).
- Mustofa, W. S., 2013, Kode Etik Hakim (Semaran: PrenadaMediaGroup), 2013, Kode Etik Hakim, (Jakarts: Kencana).
- Makaraao, T. O. 2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Cet. 1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta),
- Mustofa , W. S., 2013, Kode Etik Hakim (Semarang: Prenadamedia Group).
- Mujahidin, A., 2012, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi Format-Format Perkara, Bogor: Galia Indo.
- Martokusumo, S., 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, P, M., 2005, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Oemarsalim, 2012, Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.
- RAS, R., 2009, Tip Hukum Praktis, Tanah dan Bangunan, Depok: Rsih Asa Sukses.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. (2009). "Penelitian Hukum normatif: Suatu Tinjauan Singkat ". Jakarta: Rajawali Pers.
- Salam, Fais., 2005, Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia, Bandung Mandar Maju.
- Sunanto, U., 2019, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Cet-6, Jakarta Timur: PrenadaMedia Group
- Sutedi, A., 2007, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika.

- Soimin, S., 2004, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsuddin, R. 2019, Pengantar Hukum Indonesia, Cet 1, Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Sulistian,S,L., 2015, Kedudukan Hukum Anak (Bandung,Refika Aditama).
- Subekti. 2005. Pokok-pokok Hukum perdata. Cet. Ke-32. Dikutip dari CD, Jakarta: Intermasa.
- Suwasta, D, A.,Ujuh Juhanda, Tommy Fitriah Alfiany, Astri Sri Mulyanti, 2024, Pengantar Hukum Perdata, Makassar, Cv Tohar Media.
- Sunarto, 2014., Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata (Jakarta: Prenada Media Group.).
- Syarief, HJ. E., 2020, Praktik Peradilan Perdata: Teknik dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan, Cet 1, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Wisnubroto, A., 1997, Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Yunus, B., (Editor), Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama Yogyakarta, UII Press, Cetakan Pertama, 2020.
- Zuhriah, E., 2009, Peradilan Agama Indonesia, Malang: UIN- Malang Press.

JURNAL/ MAKALAH/ SKRIPSI

- Rselin Tasik Lino, (2021), ‘‘Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur Oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta warisan’’, jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 2: 2723-2298, hlm 131-146
- H. Elita Savira, dkk., Penetapan Perwalian Anak yang Diminta PPAT sebagai Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah, Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dimuat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/119942-ID>
- Zulfa S. Alfarobi dan Mujiono H. Prasetyo, Penetapan Perwalian Anak terkait Pertanggungjawaban Orang Tua Menjual Harta Anak di Bawah Umur Karena Pewarisan, Jurnal Notarius, Vol. 12, No. 1 2020
- Irselin Tasik Lino. (2021). Permohonan perwalian anak dibawah umur oleh ibu kandung dalam pengelolaan harta warisan. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA. 4(2): 131-146.
- Usri Sulistiyoningrum, (2023). ‘‘Perwalian Anak Dalam Menjual Harta Anak di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta

Nomor.267/PDT.P/2021/PN Skt)”, Jurnal Bevinging, Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surabaya, vol 01 No 09

Purba, P., M. 2022. Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dengan Ancaman Kekerasan Yang Dilakukan Orang Tua Kandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2017/PN.Rap). Rantauprapat: Universitas Labuhanbatu, hal: 28-29.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

KUH Perdata

KUHPerdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya

WEBSITE

https://pasungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89%20Tentang%20Putusan%201.pdf Di akses Pukul 20.00, Tanggal 26 oktober 2024

<https://siplawfirm.id/amar-putusan-perdata/?lang=id> Di akses Pukul 19.00, Tanggal 27 oktober 2024

<https://pendowoharjo.bantulkab.go.id/first/artikel/3169-Hukum-Perkawinan-yang-Ada>
diIndonesia#:~:text=Disampaikan%20bahwa%20dasar%20hukum%20perkawinan,catatkan%20menurut%20peraturan%20perundang%2Dundangan.
Diakses Pukul 20.13, tanggal 27 oktober 2024

<https://www.kompas.tv/ekonomi/442933/cara-mengurus-akta-jual-beli-tanah-dan-syarat-dokumen-yang-dibutuhkan> Di akses Pukul 19.00 Tanggal 10 Desember 2024

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuhperdata-lt4ecc7cf50640b/> Di akses Pukul 21.00,wib, Tanggal 11 Desember 2014